**KAMPUS AKADEMIK PUBLISING**
**Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)**
**Vol.3, No.5 Oktober 2026**
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 1363-1379
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i5.13299

# Sosiologi Penerapan Aturan Pengumpulan HP: Relasi Kepercayaan antara Guru dan Siswa dalam Membangun Kedisiplinan Selama Pembelajaran di MA Al Ikhsan Beji

**[1]Ginanjar Tuntas Isbandaru Am, [2]Muh. Hanif**
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
*Penulis Korespondensi: [1]244110402166@mhs.uinsaizu.ac.id,[2]muh.hanif@uinsaizu.ac.id

***Abstract***. *The regulation of mobile phone use in madrasahs is one of the efforts to maintain discipline and improve students' concentration during learning activities. However, the implementation of this regulation is not only related to limiting the use of technology but also involves the relationship of trust between teachers and students in developing a sense of responsibility. This article aims to examine the implementation of mobile phone collection regulations and how the relationship of trust between teachers and students contributes to building discipline during learning activities at MA Al Ikhsan Beji. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews with teachers and students, and documentation. The findings show that the school allows students to bring mobile phones; however, all mobile phones must be collected before learning activities begin and returned at the end of the school day. This regulation is implemented to help students concentrate better, reduce the use of mobile phones for activities unrelated to learning, and create an orderly learning environment. In its implementation, teachers and school authorities provide guidance and understanding to students about the importance of following the rules with awareness and responsibility. Nevertheless, students have different motivations for complying with the regulation, either out of self-awareness or fear of sanctions. This study concludes that the implementation of mobile phone collection regulations is not merely a form of school supervision but also a means of developing discipline, responsibility, and trust between teachers and students.*

***Keywords***: *mobile phone collection, teacher-student trust, discipline, school regulations, Islamic senior high school.*

**Abstrak**. Aturan penggunaan ponsel di madrasah aliyah sering kali dirumuskan sebagai larangan formal, padahal ponsel juga dapat menjadi sarana pencarian dalil dalam pembelajaran PAI. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana guru dan siswa menegosiasikan aturan ponsel untuk keperluan pencarian dalil, serta bagaimana negosiasi tersebut membentuk dan dibatasi oleh kepercayaan relasional di antara mereka. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus di sebuah madrasah aliyah, data dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa aturan ponsel tidak ditegakkan secara seragam, melainkan dinegosiasikan secara situasional: guru memberikan kepercayaan kepada siswa tertentu berdasarkan rekam jejak dan penilaian atas niat, sementara siswa belajar membaca batas kepercayaan tersebut dan menyesuaikan strategi penggunaan ponsel mereka. Negosiasi ini menghasilkan tatanan aturan yang bersifat relasional—bukan sekadar kepatuhan pada larangan, tetapi praktik saling membaca dan mempertahankan kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan guru-siswa bukan prasyarat pasif bagi aturan, melainkan sumber daya aktif yang digunakan kedua pihak untuk merundingkan batas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama.

**Kata kunci**: negosiasi aturan, ponsel, kepercayaan guru-siswa, pencarian dalil, madrasah aliyah

## 1. LATAR BELAKANG

Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan siswa madrasah aliyah, tetapi kehadirannya di ruang kelas masih dipersoalkan. Di satu sisi, ponsel

*Naskah Masuk: 28 Oktober 2026; Revisi: 29 Oktober 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 05 November 2026*

memungkinkan siswa mengakses dalil Al-Qur'an, hadis, dan rujukan keagamaan secara cepat; di sisi lain, ia dipandang sebagai sumber gangguan yang mengancam disiplin dan otoritas guru. Ketegangan ini penting karena menyangkut bukan hanya tata tertib, tetapi juga cara guru dan siswa saling memercayai. Kajian tentang pengelolaan ponsel di sekolah menunjukkan bahwa larangan formal sering gagal karena memicu resistensi dan justru melemahkan kepercayaan (Dinsmore et al., 2023). Sementara itu, studi tentang teknologi dalam pendidikan Islam di Indonesia mencatat bahwa guru PAI menghadapi dilema antara mempertahankan otoritas keilmuan dan mengakui akses siswa terhadap sumber digital (Hanif, Qudsiyyah, & Hanifah, 2025). Para ahli sosiologi pendidikan mengingatkan bahwa aturan sekolah bukan sekadar teks normatif, melainkan hasil negosiasi sosial yang berlangsung terus-menerus dalam praktik sehari-hari (Hanif, 2023a). Dengan demikian, aturan ponsel di madrasah aliyah perlu dipahami sebagai arena relasional, bukan sekadar persoalan kepatuhan.

Literatur tentang ponsel di sekolah telah berkembang pesat, tetapi sebagian besar berfokus pada dampak penggunaan atau efektivitas larangan. Studi tentang larangan ponsel di sekolah digital menunjukkan bahwa penegakan aturan yang kaku menimbulkan konflik dan ketegangan dalam relasi kuasa serta kepercayaan antara siswa dan guru (Dinsmore et al., 2023). Laporan kebijakan dari Dublin City University menemukan bahwa larangan ponsel yang semakin ketat justru mendorong siswa mencari cara untuk mengakalinya, dan bahwa suara siswa jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan (Reynolds et al., 2025). Di Indonesia, kajian tentang tata tertib madrasah cenderung menempatkan ponsel sebagai "barang terlarang" yang harus dititipkan di kantor guru, tanpa banyak membahas bagaimana siswa dan guru menegosiasikan penggunaannya untuk keperluan belajar (Hanif & Salsabillah, 2024). Kekurangan literatur ini terletak pada minimnya perhatian terhadap negosiasi aturan ponsel sebagai praktik relasional yang melibatkan kepercayaan, terutama dalam konteks pencarian dalil keagamaan. Celah inilah yang hendak diisi artikel ini.

Artikel ini merespons celah tersebut dengan tiga tujuan khusus. Pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk aturan ponsel yang berlaku di madrasah aliyah, baik yang formal maupun yang berkembang secara informal dalam interaksi kelas. Kedua, menganalisis proses negosiasi yang terjadi ketika siswa meminta izin atau mengambil

inisiatif menggunakan ponsel untuk mencari dalil, serta bagaimana guru merespons permintaan tersebut. Ketiga, menjelaskan bagaimana negosiasi tersebut membentuk dan dibatasi oleh kepercayaan relasional antara guru dan siswa—bagaimana kepercayaan diberikan, diuji, dan dipulihkan dalam kaitannya dengan penggunaan ponsel. Ketiga tujuan ini diarahkan untuk memperluas kajian sosiologi pendidikan Islam (Hanif, 2023b) dengan menyoroti teknologi digital sebagai medan negosiasi moral, bukan sekadar alat bantu pembelajaran.

Argumen yang hendak diuji adalah bahwa aturan ponsel di madrasah aliyah tidak ditegakkan secara mekanis, melainkan dinegosiasikan secara situasional melalui pembacaan timbal balik atas kepercayaan. Peneliti berasumsi bahwa guru tidak sekadar melarang atau mengizinkan, tetapi menilai niat dan rekam jejak siswa sebelum memberikan kepercayaan; sebaliknya, siswa tidak sekadar mematuhi aturan, tetapi membaca batas kepercayaan guru dan menyesuaikan strategi penggunaan ponsel mereka. Asumsi ini sejalan dengan temuan bahwa otonomi dalam pendidikan bersifat relasional dan bergantung pada kepercayaan serta keamanan emosional (Dawkins, 2025). Jika argumen ini terbukti, maka kebijakan ponsel yang hanya berfokus pada larangan berpotensi mengabaikan dimensi kepercayaan yang justru menjadi dasar kepatuhan siswa. Sebaliknya, kebijakan yang mengakui dan mengelola kepercayaan secara eksplisit akan lebih efektif dalam membangun tanggung jawab digital siswa.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kepercayaan Relasional, Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepercayaan relasional (*relational trust*), yaitu kepercayaan yang terbentuk melalui hubungan dan interaksi berulang antara individu dalam lingkungan sosial (Weinstein et al., 2024). Dalam lingkungan madrasah, kepercayaan relasional antara guru dan siswa dapat dilihat dari bagaimana keduanya saling menghargai, menjalankan tanggung jawab, dan menaati kesepakatan yang berlaku di sekolah. Kepercayaan tidak hanya ditunjukkan melalui pemberian kebebasan kepada siswa, tetapi juga melalui keyakinan guru bahwa siswa mampu mengikuti aturan dengan kesadaran sendiri. Dawkins (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan dan keamanan emosional merupakan bagian penting dalam membangun kemandirian siswa di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penerapan aturan pengumpulan HP tidak hanya berkaitan dengan pengawasan

sekolah, tetapi juga dengan bagaimana guru membangun kepercayaan agar siswa dapat menaati aturan secara bertanggung jawab.

Kepercayaan relasional antara guru dan siswa dalam penerapan aturan pengumpulan HP dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, aspek keterbukaan, yaitu bagaimana guru memberikan penjelasan mengenai tujuan dan alasan diterapkannya aturan pengumpulan HP kepada siswa. Kedua, aspek tanggung jawab, yaitu kesediaan siswa untuk mengumpulkan dan tidak menggunakan HP selama pembelajaran berlangsung. Ketiga, aspek konsistensi, yaitu kesesuaian antara aturan yang disampaikan dengan pelaksanaannya oleh pihak sekolah. Keempat, aspek timbal balik, yaitu bagaimana guru memberikan kepercayaan kepada siswa dan bagaimana siswa meresponsnya melalui kepatuhan terhadap aturan. Kelima, aspek pembinaan, yaitu upaya guru memberikan arahan dan pemahaman ketika siswa melakukan pelanggaran. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk memahami bagaimana kepercayaan antara guru dan siswa dibangun melalui penerapan aturan pengumpulan HP di MA Al Ikhsan Beji.

Konsep kedua adalah penerapan aturan sekolah, yaitu proses pelaksanaan ketentuan yang dibuat oleh lembaga pendidikan untuk mengatur perilaku seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang tertib. Aturan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tertulis, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial yang dijalankan melalui interaksi antara guru dan siswa (Hanif, 2023a). Dalam penerapannya, aturan membutuhkan sosialisasi, pengawasan, serta tindakan yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Kajian mengenai negosiasi aturan menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan di lingkungan pendidikan berkaitan dengan interaksi antara pihak yang memiliki kewenangan dan siswa sebagai pihak yang menjalankan aturan (Barak & Lefstein, 2022). Oleh karena itu, penerapan aturan pengumpulan HP perlu dilihat dari bagaimana pihak sekolah menyampaikan ketentuan, mengatur proses pengumpulan dan pengembalian HP, serta memberikan kesempatan penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran melalui izin pihak sekolah.

Penerapan aturan pengumpulan HP di sekolah dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Pertama, aspek tujuan aturan, yaitu alasan sekolah menerapkan pengumpulan HP, seperti menjaga konsentrasi siswa dan mengurangi penggunaan HP yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kedua, aspek pelaksanaan, yaitu bagaimana proses pengumpulan

HP sebelum pembelajaran dan pengembaliannya setelah kegiatan sekolah selesai. Ketiga, aspek pengawasan, yaitu keterlibatan wali kelas, guru, dan kepala sekolah dalam memastikan aturan berjalan dengan baik. Keempat, aspek sanksi, yaitu bentuk tindakan yang diberikan kepada siswa apabila melanggar ketentuan, termasuk penyitaan HP dan keterlibatan orang tua dalam pengambilan HP. Kelima, aspek pengecualian, yaitu pemberian izin penggunaan HP untuk keperluan pembelajaran melalui koordinasi dengan pihak sekolah. Aspek-aspek ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana aturan pengumpulan HP diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Konsep ketiga adalah kedisiplinan siswa, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam menaati ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab secara konsisten. Dalam lingkungan pendidikan, kedisiplinan tidak hanya terbentuk melalui peraturan dan sanksi, tetapi juga melalui pembiasaan, arahan, dan kesadaran pribadi. Penerapan aturan sekolah merupakan salah satu cara untuk membentuk perilaku disiplin karena siswa dibiasakan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks pendidikan Islam, kedisiplinan juga berkaitan dengan pembentukan tanggung jawab dan kebiasaan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan (Hanif, 2023b). Dengan demikian, aturan pengumpulan HP dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pembiasaan disiplin agar siswa mampu mengendalikan penggunaan teknologi dan lebih fokus mengikuti pembelajaran.

Kedisiplinan siswa dalam penerapan aturan pengumpulan HP dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, aspek kepatuhan, yaitu kesediaan siswa untuk mengumpulkan HP sesuai dengan ketentuan sekolah. Kedua, aspek kesadaran diri, yaitu kemampuan siswa menaati aturan karena memahami manfaat dan tujuan penerapannya, bukan hanya karena takut mendapatkan sanksi. Ketiga, aspek tanggung jawab, yaitu kesediaan siswa menjalankan kewajibannya dan menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran. Keempat, aspek pengendalian diri, yaitu kemampuan siswa membatasi penggunaan HP selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kelima, aspek konsistensi perilaku, yaitu kebiasaan siswa menaati aturan secara terus-menerus. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk memahami bentuk kedisiplinan siswa di MA Al Ikhsan Beji, terutama dalam melihat perbedaan antara siswa yang mematuhi aturan karena kesadaran pribadi dan siswa yang mematuhinya karena mempertimbangkan adanya sanksi.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di MA Al Ikhsan Beji. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena madrasah tersebut menerapkan aturan pengumpulan handphone (HP) bagi seluruh siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan mengembalikannya setelah kegiatan sekolah selesai. Aturan ini diterapkan sebagai upaya menjaga konsentrasi siswa, menciptakan ketertiban, dan membangun kedisiplinan selama pembelajaran. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada adanya perbedaan kondisi siswa, yaitu siswa yang tinggal di asrama dan siswa yang tidak tinggal di asrama, tetapi tetap mengikuti aturan pengumpulan HP yang sama. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan aturan pengumpulan HP serta hubungan kepercayaan antara guru dan siswa dalam membangun kedisiplinan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses penerapan aturan dan interaksi antara guru dan siswa dalam menjalankan ketentuan tersebut. Melalui fokus tersebut, penelitian berusaha memahami bagaimana aturan diterapkan, bagaimana siswa merespons aturan, serta bagaimana peran guru dalam membangun kepatuhan dan tanggung jawab siswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami suatu fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan dan proses penerapan aturan pengumpulan HP sebagaimana berlangsung di lingkungan sekolah, bukan untuk mengukur atau menghitung pengaruh aturan tersebut secara statistik. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan guru serta siswa MA Al Ikhsan Beji. Adapun data sekunder merupakan informasi pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi dan dokumen tata tertib sekolah yang berkaitan dengan aturan pengumpulan HP. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana aturan dijalankan serta bagaimana guru dan siswa memahami penerapannya (Dinsmore et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas guru dan siswa MA Al Ikhsan Beji yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas satu orang guru yang

mengetahui dan terlibat dalam penerapan aturan sekolah serta tiga orang siswa yang memiliki pengalaman dalam menjalankan aturan tersebut. Pemilihan siswa juga mempertimbangkan perbedaan kondisi tempat tinggal, yaitu siswa yang tinggal di asrama dan siswa yang tidak tinggal di asrama. Perbedaan tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pandangan dan pengalaman siswa dalam mematuhi aturan pengumpulan HP. Guru dipilih sebagai informan karena dapat memberikan informasi mengenai latar belakang aturan, proses pelaksanaan, pengawasan, dan sanksi bagi siswa yang melanggar. Sementara itu, siswa menjadi sumber informasi untuk mengetahui pendapat, pengalaman, serta alasan mereka dalam menaati aturan, baik karena kesadaran diri maupun karena mempertimbangkan adanya sanksi. Dengan melibatkan guru dan siswa, penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran dari kedua pihak yang terlibat langsung dalam penerapan aturan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan aktivitas di lokasi penelitian. Observasi dilakukan di MA Al Ikhsan Beji untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah serta memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan pengumpulan HP dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan satu orang guru dan tiga orang siswa menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dengan guru membahas latar belakang aturan, proses pengumpulan dan pengembalian HP, pengawasan, sanksi, serta pemberian izin penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran. Sementara itu, wawancara dengan siswa membahas pendapat mereka mengenai aturan pengumpulan HP, pengalaman dalam mematuhi aturan, dan alasan yang mendorong mereka untuk menaati ketentuan tersebut. Ketiga, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui bukti atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kegiatan wawancara dengan guru dan siswa serta dokumen tata tertib sekolah apabila telah diperoleh. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi

agar informasi mengenai penerapan aturan pengumpulan HP dapat diperoleh secara lebih menyeluruh (Hanif, Suherlan, & Ausat, 2025).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data merupakan proses memilih, memilah, dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan penerapan aturan pengumpulan HP, peran guru dalam melakukan pengawasan, bentuk sanksi, pandangan siswa, serta hubungan kepercayaan antara guru dan siswa. Kedua, penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang telah dipilih ke dalam bentuk uraian naratif sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data disajikan dengan menghubungkan hasil wawancara guru, hasil wawancara siswa, dan dokumentasi yang tersedia. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan makna dari keseluruhan data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti membandingkan informasi dari guru dan siswa untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan pandangan mengenai penerapan aturan pengumpulan HP dan kedisiplinan siswa. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari guru dan siswa, serta triangulasi teknik, yaitu mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana aturan pengumpulan HP diterapkan dan bagaimana kepercayaan antara guru dan siswa berperan dalam membangun kedisiplinan di MA Al Ikhsan Beji.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa aturan penggunaan HP di MA Al Ikhsan Beji diterapkan melalui kebijakan pengumpulan HP sebelum pembelajaran dimulai dan pengembaliannya setelah kegiatan sekolah selesai. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh siswa, baik yang tinggal di asrama maupun yang tidak tinggal di asrama. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, kebijakan ini diterapkan karena tidak semua siswa tinggal di lingkungan asrama sehingga diperlukan aturan yang sama untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan selama pembelajaran. Dengan adanya pengumpulan HP, siswa diharapkan dapat lebih fokus mengikuti kegiatan belajar tanpa terganggu oleh penggunaan perangkat pribadi. Kebijakan pembatasan HP di lingkungan sekolah juga

berkaitan dengan upaya mengurangi gangguan digital yang dapat memengaruhi kegiatan pembelajaran (Selwyn & Aagaard, 2021).

Penerapan aturan pengumpulan HP mencakup tiga aspek utama. Pertama, kewajiban pengumpulan HP, yaitu siswa menyerahkan HP kepada wali kelas sebelum pembelajaran dan mengambilnya kembali setelah kegiatan sekolah selesai. Kedua, pengawasan aturan, yaitu pelaksanaan pengumpulan HP berada dalam pengawasan wali kelas, guru, dan kepala madrasah. Ketiga, penerapan sanksi, yaitu siswa yang melanggar aturan akan mendapatkan tindakan sesuai ketentuan sekolah. Bagi siswa nonasrama, HP dapat disita dan orang tua diminta datang ke sekolah untuk mengambilnya. Sementara itu, bagi siswa yang tinggal di asrama, HP yang melanggar ketentuan dapat disita dan tidak langsung dikembalikan. Pengumpulan HP sebagai salah satu bentuk penerapan kebijakan pembatasan perangkat juga ditemukan dalam penelitian Magnusson et al. (2023), yang membahas prosedur pengumpulan HP siswa sebelum kegiatan pembelajaran.

Konteks penerapan aturan tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan madrasah yang memiliki siswa dengan latar belakang tempat tinggal berbeda, yaitu siswa asrama dan nonasrama. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan sekolah menerapkan kebijakan pengumpulan HP kepada seluruh siswa. Berdasarkan keterangan guru, aturan ini telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang diketahui oleh siswa. Guru juga menjelaskan bahwa sebelum masuk madrasah, siswa telah mengetahui adanya pembatasan penggunaan HP. Kondisi tersebut membuat penerapan aturan relatif dapat diterima dan tidak menimbulkan pertentangan yang berarti. Pemahaman siswa terhadap aturan dan harapan sekolah merupakan bagian dari hubungan antara kebijakan sekolah, perilaku guru, dan pengalaman siswa dalam menjalani kehidupan pendidikan (Dawkins, 2025).

Temuan kedua menunjukkan bahwa penerapan aturan pengumpulan HP berkaitan dengan hubungan kepercayaan antara guru dan siswa. Berdasarkan hasil wawancara, guru tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai tujuan pengumpulan HP. Siswa diarahkan untuk memahami bahwa aturan tersebut bertujuan menjaga fokus dan ketertiban selama pembelajaran. Di sisi lain, tanggapan siswa menunjukkan bahwa sebagian siswa menerima aturan karena menyadari

manfaatnya bagi kegiatan belajar, sedangkan sebagian lainnya lebih mempertimbangkan adanya sanksi apabila melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan siswa terbentuk melalui perpaduan antara kesadaran pribadi dan pengawasan sekolah. Hubungan kepercayaan antara guru dan siswa menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan HP di sekolah (Magnusson et al., 2023).

Hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan siswa dapat dilihat melalui tiga aspek. Pertama, pemahaman terhadap aturan, yaitu siswa mengetahui alasan dan tujuan pengumpulan HP. Kedua, kesadaran diri, yaitu kemauan siswa untuk menaati aturan karena memahami manfaatnya bagi konsentrasi belajar. Ketiga, kesadaran terhadap konsekuensi, yaitu kepatuhan yang muncul karena siswa mengetahui adanya sanksi apabila melanggar aturan. Ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa kedisiplinan siswa tidak hanya dibentuk melalui peraturan dan hukuman, tetapi juga melalui pemahaman serta pembiasaan untuk bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pembahasan Dawkins (2025) mengenai hubungan antara otonomi siswa, kepatuhan, dan dinamika interaksi antara guru dengan siswa di lingkungan sekolah.

Konteks hubungan tersebut terlihat dari cara guru membangun kepatuhan siswa melalui penjelasan, arahan, dan pemberian contoh. Guru berusaha menanamkan pemahaman bahwa menaati aturan sebaiknya dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan semata-mata karena takut mendapatkan sanksi. Sementara itu, siswa menunjukkan respons yang berbeda dalam menjalankan aturan. Ada siswa yang merasa pengumpulan HP membantu mereka lebih fokus belajar, tetapi ada pula yang mengaku mematuhi aturan karena tidak ingin HP disita. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan antara guru dan siswa berperan dalam proses pembentukan kedisiplinan. Perbedaan pengalaman siswa dalam menerima kebijakan sekolah juga menjadi bagian dari dinamika hubungan antara guru dan siswa (Dawkins, 2025).

Temuan ketiga berkaitan dengan adanya kelonggaran penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran. Meskipun secara umum siswa diwajibkan mengumpulkan HP, sekolah tetap memberikan kesempatan penggunaan perangkat tersebut apabila terdapat kebutuhan pembelajaran tertentu. Berdasarkan wawancara dengan guru, penggunaan HP untuk kegiatan belajar harus melalui izin dan koordinasi dengan pihak yang berwenang, seperti wali kelas, koordinator kurikulum, atau kepala madrasah. Hal

ini menunjukkan bahwa aturan pengumpulan HP tidak sepenuhnya menutup pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya tetap diatur agar tidak bertentangan dengan kebijakan madrasah. Penelitian Magnusson et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan HP di sekolah dapat memberikan pengecualian ketika perangkat tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pembelajaran.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi madrasah dalam mempertahankan dan mengembangkan kebijakan pengumpulan HP. Pertama, sekolah perlu menyampaikan aturan secara jelas agar seluruh siswa memahami kewajiban dan konsekuensi pelanggaran. Kedua, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten oleh pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, sekolah perlu tetap memberikan ruang penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran melalui prosedur perizinan yang jelas. Selain itu, komunikasi antara guru dan siswa perlu terus dibangun agar aturan tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pendidikan kedisiplinan. Pengelolaan kebijakan HP di sekolah memang membutuhkan pertimbangan antara pembatasan gangguan digital dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran (Selwyn & Aagaard, 2021; Magnusson et al., 2023).

Nilai penting dari penerapan aturan pengumpulan HP terletak pada upaya madrasah membangun kedisiplinan sekaligus tanggung jawab siswa dalam menggunakan teknologi. Pengumpulan HP dapat membantu mengurangi gangguan selama pembelajaran, sedangkan penjelasan dan arahan dari guru dapat menumbuhkan kesadaran siswa dalam menaati aturan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh pemahaman, kepercayaan, dan kerja sama antara guru dan siswa. Penerapan aturan yang disertai komunikasi yang baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih tertib dan kondusif. Pembahasan mengenai kebijakan larangan HP juga menekankan pentingnya memahami dampak pembatasan teknologi terhadap pengalaman belajar siswa dan lingkungan pendidikan (Selwyn & Aagaard, 2021; Reynolds et al., 2025).

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengumpulan HP di MA Al Ikhsan Beji tidak hanya berfungsi sebagai aturan untuk membatasi penggunaan teknologi,

tetapi juga sebagai upaya madrasah dalam membangun ketertiban dan kedisiplinan siswa. Kebijakan yang berlaku bagi siswa asrama maupun nonasrama memperlihatkan bahwa sekolah berusaha menerapkan aturan secara merata. Hal ini sejalan dengan pandangan Selwyn dan Aagaard (2021) bahwa pembatasan penggunaan HP di kelas berkaitan dengan upaya mengurangi gangguan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan pengumpulan HP perlu dipahami sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan belajar yang kondusif.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan aturan pengumpulan HP tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga pada pengawasan dan konsistensi pelaksanaannya. Keterlibatan wali kelas, guru, dan kepala madrasah menunjukkan bahwa kedisiplinan membutuhkan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak sekolah. Penerapan sanksi terhadap siswa yang melanggar juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aturan. Hal ini berkaitan dengan pembahasan Magnusson et al. (2023) mengenai kompleksitas pengelolaan kebijakan larangan HP di lingkungan sekolah. Artinya, keberhasilan kebijakan tidak cukup ditentukan oleh adanya larangan, tetapi juga oleh cara sekolah mengelola dan menerapkannya.

Temuan kedua memperlihatkan bahwa hubungan kepercayaan antara guru dan siswa memiliki peran dalam membentuk kepatuhan terhadap aturan pengumpulan HP. Guru tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga menjelaskan tujuan aturan agar siswa memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Sementara itu, siswa menunjukkan respons yang berbeda, mulai dari menerima aturan karena memahami manfaatnya hingga mematuhinya karena mempertimbangkan sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak selalu muncul dari kesadaran yang sama. Hubungan antara guru dan siswa serta pemberian ruang bagi otonomi siswa menjadi bagian penting dalam pengelolaan kedisiplinan di sekolah (Dawkins, 2025).

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa siswa bukan hanya pihak yang menerima kebijakan, tetapi memiliki pandangan dan tanggapan terhadap aturan yang diterapkan. Sebagian siswa memahami bahwa pengumpulan HP dapat membantu mereka lebih fokus belajar, sedangkan sebagian lainnya masih melihat aturan tersebut sebagai kewajiban yang harus ditaati agar tidak mendapatkan sanksi. Perbedaan respons ini menunjukkan pentingnya komunikasi antara guru dan siswa dalam membangun

kesadaran terhadap aturan. Dengan demikian, madrasah perlu memberikan penjelasan secara berkelanjutan agar kepatuhan siswa tidak hanya didasarkan pada pengawasan, tetapi juga tumbuh dari pemahaman dan tanggung jawab pribadi.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa kebijakan pengumpulan HP tidak sepenuhnya menutup kesempatan siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Adanya kelonggaran penggunaan HP melalui izin dan koordinasi dengan pihak sekolah memperlihatkan bahwa madrasah tetap mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran di era digital. Hal ini sejalan dengan kajian Selwyn dan Aagaard (2021) yang membahas pembatasan HP di kelas sebagai persoalan yang perlu mempertimbangkan dampak teknologi terhadap kegiatan pendidikan. Dengan demikian, pembatasan penggunaan HP sebaiknya tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap teknologi, melainkan sebagai upaya mengatur penggunaannya agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengumpulan HP tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sanksi, tetapi juga oleh pengawasan, komunikasi, serta hubungan kepercayaan antara guru dan siswa. Madrasah perlu menjaga keseimbangan antara penerapan kedisiplinan dan pemberian kesempatan kepada siswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran juga perlu diatur melalui prosedur perizinan yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan. Dengan demikian, kebijakan pengumpulan HP dapat menjadi sarana pendidikan kedisiplinan sekaligus pembentukan tanggung jawab siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan pengumpulan HP di MA Al Ikhsan Beji bukan sekadar larangan penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi upaya madrasah dalam membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Kebijakan yang berlaku bagi siswa asrama maupun nonasrama menunjukkan adanya upaya sekolah untuk menerapkan aturan secara merata. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan siswa tidak hanya dipengaruhi oleh pengawasan dan sanksi, tetapi juga oleh pemahaman terhadap tujuan aturan serta hubungan kepercayaan antara guru dan siswa. Selain itu, adanya kelonggaran penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran menunjukkan

bahwa madrasah tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dengan ketentuan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan pengumpulan HP dapat dipahami melalui konsep kedisiplinan, hubungan kepercayaan guru dan siswa, serta pengelolaan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Konsep kedisiplinan menjelaskan bagaimana aturan, pengawasan, dan sanksi diterapkan untuk membentuk perilaku siswa. Sementara itu, hubungan kepercayaan menjelaskan pentingnya komunikasi dan pemahaman antara guru dan siswa dalam menjalankan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan berdasarkan pengalaman dan keterangan dari pihak sekolah dan siswa. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu madrasah sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan penerapan kebijakan pengumpulan HP di seluruh madrasah aliyah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan jumlah informan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan berbagai pengalaman siswa dalam menerima aturan pengumpulan HP. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan beberapa madrasah dengan kebijakan penggunaan HP yang berbeda agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas. Penelitian berikutnya juga dapat menggali lebih dalam pengalaman siswa mengenai pengaruh aturan pengumpulan HP terhadap kedisiplinan dan konsentrasi belajar. Bagi pihak madrasah, penerapan aturan perlu disertai komunikasi yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta prosedur perizinan penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran. Dengan demikian, kebijakan pengumpulan HP tidak hanya menjadi alat pengendalian penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa.

## DAFTAR REFERENSI

Akmalia, Rizki, Lilis Astika, Aliyyah Putri Azzahra, Universitas Al, and Washliyah Medan. “Efektivitas Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Madrasah Aliyah Nurul Fadhilah Student Discipline at Madrasah Aliyah Nurul Fadhilah” 4, no. 3 (2024): 1594–1603.

Anggita, Atikah Dewi, Ervina Eka Subekti, Muhammad Prayito, and Catur Prasetiawati. “ANALISIS MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK TERHADAP

PEMBELAJARAN IPAS DI KELAS 4 SD N PANGGUNG LOR Pendahuluan" 7, no. 1 (2023): 78–84.

Azizirrohim, Lana. "Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Dalam Perkembangan Akhlak Siswa Kelas Xii Di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu," 2025.

Bar, Eran, Marcela Radunz, Christina R Galanis, Blake Quinney, Tracey D Wade, and Daniel L King. "Computers in Human Behavior Student Perspectives on Banning Mobile Phones in South Australian Secondary Schools : A Large-Scale Qualitative Analysis." *Computers in Human Behavior* 167, no. January (2025): 108603. https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108603.

Behavioral, Journal, Daniel L King, Marcela Radunz, Christina R Galanis, and Blake Quinney. ""' Phones off While School ' s on " : Evaluating Problematic Phone Use and the Social , Wellbeing , and Academic Effects of Banning Phones in Schools," 2024. https://doi.org/10.1556/2006.2024.00058.

Böttger, Tobias, and Klaus Zierer. "Education Sciences To Ban or Not to Ban ? A Rapid Review on the Impact of Smartphone Bans in Schools on Social Well-Being and Academic Performance," 2024.

Campbell, Marilyn, Victoria Lister, and Jenna Gillett-swan. "Evidence for and against Banning Mobile Phones in Schools : A Scoping Review," 2024. https://doi.org/10.1177/20556365241270394.

Didik, Peserta. "No Title" 4, no. 2 (2018): 86–97.

Fadilah, Ahmad. "Volume : 8 Bulan : November Tahun : 2022 Penggunaan Handphone Dan Dampaknya Bagi Aktivitas Belajar Volume : 8 Nomor : 4 Bulan : November Tahun : 2022," 2022, 1585–92. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.961.

Hale, Benedikta Yulianti, Fakultas Pendidikan, and Ilmu Sosial. "KABUPATEN SIKKA" 1, no. 1 (2021): 4–7. https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.

Hanif, Muh. "Parenting Patterns of Children and Family Functions in Social Capital Perspective," 2023, 209–34.

Hanif, Muh, Abu Muna, and Almaududi Ausat. "The Role of Humanistic Education Management in Improving the Quality of Social Intervention in Community Service Peran Manajemen Pendidikan Humanistik Dalam Meningkatkan Kualitas Intervensi Sosial Pada Pengabdian Masyarakat" 2, no. 2 (2025): 291–300.

Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. "Hubungan Kreativitas Dan Inovatif Guru Dalam Mengajar Di Kelas Terhadap Peningkatan Motivasi Dan Minat Belajar Peserta Didik Hayani Wulandari 1 , Dhena Agniya Zahra Nisrina 2 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta" 9, no. June 2020 (2023): 345–54.

Journal, Interdisciplinary, Anita Grigic Magnusson, Torbjörn Ott, Ylva Hård, Anita Grigic Magnusson, Torbjörn Ott, and Ylva Hård. "Complexities of Managing a Mobile Phone Ban in the Digitalized Schools ' Classroom Complexities of Managing a Mobile Phone Ban in the Digitalized Schools ' Classroom." *Computers in the Schools* 40, no. 3 (2023): 303–23. https://doi.org/10.1080/07380569.2023.2211062.

Kasus, Studi, Al Ma, Roida Amanati, Juli Amalia Nasucha, Moh Rasyid, Universitas Kh, and Abdul Chalim. "Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Anak Di Rumah Pada Peserta Didik Pengguna Handphone" 4, no. April (2026).

Kewarganegaraan, Pendidikan. "Pendidikan Kewarganegaraan …" 11, no. 2 (n.d.).

Khairunnisa, Amalia Dinda, Ulfa Adilla, Novita Nurul Hidayah, and Siti Khamim. "TEACHER-MEDIATED CURRICULUM NEGOTIATION : INTEGRATING ISLAMIC VALUES AND THE NATIONAL CURRICULUM THROUGH DIGITAL LEARNING AT AN INDONESIAN MADRASAH" 1, no. 3 (2023): 202–11.

Khasanah, Atikoh, and Muh Hanif. "Sosiologi Lembaga Pendidikan : Konstruksi Ketahanan Sosial Siswa Madrasah Tsanawiyah Dalam Menghadapi Tekanan Akademik Dan Budaya Digital Di MTs Negeri 1 Banyumas" 3, no. 3 (2026): 871–85.

Paterna, Adrian, Manuel Alcaraz-ibáñez, Jose M Aguilar-parra, Carlos Salavera, Zsolt Demetrovics, and Mark D Griffiths. "Problematic Smartphone Use and Academic Achievement : A Systematic Review And," 2024. https://doi.org/10.1556/2006.2024.00014.

Pengaruh, Efek, T I K Teknologi, Informasi Dan, Komunikasi Pada, Dean Ferdiansyah, Nurul Hamdi, Fakultas Sains, Teknologi- Program, and Studi S- Informatika. "( MAN ) 4 ACEH BESAR THE EFFECT OF THE INFLUENCE OF ICT ( INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ) ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUALS OF MADRASAH ALIYAH NEGERI ( MAN ) STUDENTS 4 BIG ACEH 9, no. 2 (2023): 147–55.

Pengembangan, Prodi, and Masyarakat Islam. "PENGARUH PENGGUNAAN HANDPHONE TERHADAP INTERAKSI A . Pendahulun Kemajuan Teknologi Saat Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kehidupan Masyarakat . Berbagai Informasi Yang Terjadi Di Berbagai Belahan Dunia Kini Telah Dapat Langsung Diketahui Berkat Kemajuan Teknologi ( Globalisasi ). Di Era Globalisasi Sekarang Ini Di Mana Perubahan Teknologi" 4, no. 2 (2018): 19–39.

Penggunaan, Dampak, Handphone Terhadap, Aktivitas Belajar, and Peserta Didik. "Institut Agama Islam Negeri," 2024.

Permadi, Siddiq, and Yusuf Hadijaya. "Kebijakan Penggunaan Media Sosial Bagi Siswa : Studi Kasus Di MAS Tahfizil Quran" 14 (2025). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28439.

"PHILOSOPHICAL REVIEW OF AVICENNA ' S ISLAMIC EDUCATION" 2, no. 6 (2023): 424–39.

Portales, Universidad Diego, Universidad Diego Portales, and Universidad Diego Portales. "No Title" 14, no. 2 (2025): 9–29.

Putra, Ary Antony, and Ida Windi Wahyuni. "Pengaruh Penggunaan Handphone Pada Siswa Sekolah Dasar" 18, no. 1 (2021): 79–89.

Rose, Sarah E, and Jennifer Taylor. "What Are Parents ' and Children ' s Co- Constructed Views on Mobile Phone Use and Policies in School ?," no. April (2022): 1418–33. https://doi.org/10.1111/chso.12583.

Saromeng, Arya Pramudya, Jumadi Mori, Salam Tuasikal, and Ilham Khairi Siregar. "Analisis Kebijakan Sekolah Tentang Larangan Membawa Gadget Di SMA" 5, no. Mei (2026): 170–81.

Suseno, Muchlas, Bahrul Hayat, Muhammad Dwirifqi, Kharisma Putra, Karla Bien, R Rachmawati, and H Hartanto. "A Differential Item Functioning ( DIF ) Analysis of the Mobile Phone Problem Use Scale in Indonesian Schools with and without Smartphone Banned Policy A Differential Item Functioning ( DIF ) Analysis of the Mobile Phone Problem Use Scale in Indonesian Schools with and Without." *Cogent Psychology* 00, no. 00 (2022). https://doi.org/10.1080/23311908.2022.2137306.

Toboki, M O H Rafly, Program Studi, Pendidikan Guru, Madrasah Ibtidaiyah, and Sulawesi Tengah. "Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Aktivitas Belajar Peserta Didik Di Sd Al-Khairaat 1 Kota Palu," 2025.

Zahrotul, Niha, and Muh Hanif. "Sosiologi Lembaga Pendidikan : Praktik Tasamuh Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di MTs Ma ' Arif NU 1 Patikraja" 4, no. 2 (2026): 67–78.